

FENOMENA PASANGAN TUNGGAL DAN “KOTAK/KOLOM KOSONG” PADA PILKADA KOTA TANGERANG

Bambang Kurniawan¹, Wawanudin²

¹Widyaiswara

bengsq.0701@gmail.com

²STISIP Yuppentek

wawanudin.stisipyuppentek@ac.id

ABSTRAK

Kontestasi Pilkada kota Tangerang tahun 2018 hanya diikuti oleh pasangan petahana/*incumbent* Arief R Wismansyah-Sachrudin. Hal ini menjadi fenomena baru bagi warga Kota Tangerang untuk memilih antara Paslon petahana atau kotak/kolom kosong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui opini publik tentang Pilkada pasangan tunggal di Kota Tangerang tahun 2018; Mengetahui opini publik tentang popularitas Paslon petahana Arief R Wismansyah–Sachrudin, mengetahui opini publik terhadap kinerja Paslon petahana Arief R Wismansyah–Sachrudin, mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kota Tangerang tentang kotak/kolom kosong pada Pilkada Kota Tangerang, mengetahui opini masyarakat tentang implikasi jika kotak/kolom kosong yang lebih banyak pemilihnya dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada Pilkada Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. simpulan penelitian menunjukkan bahwa Paslon petahana cukup populer, sebagian besar responden puas dengan kinerja Paslon petahana, mayoritas tidak mengetahui adanya pasangan kotak/ kolom kosong dan tidak mengetahui implikasi jika kotak/kolom kosong yang banyak dipilih atau menang. Rekomendasi yang disampaikan bahwa jika kepala daerah terpilih perlu meningkatkan kinerja pembangunannya dan perlunya sosialisasi yang lebih masih terkait pilkada pasangan tunggal dilakukan oleh KPU dan kerjasama multipihak.

Abstract

The 2018 Tangerang City Election contest was attended by only incumbent partner Arief R. Wismansyah-Sachrudin. This has become a new phenomenon for the citizens of Tangerang to choose between incumbent Paslon or empty boxes/columns. The purpose of this study was to find out public opinion about the single pair elections in Tangerang City in 2018; knew public opinion about the polity of the incumbent Arief R. Wismansyah–Sachrudin, find out public opinion the performance of Arief R Wismansyah–Sachrudin, knew the level of knowledge of the Tangerang City community about Empty Boxes/ Columns in the Tangerang City election, knew the public opinion about the implications if the Empty Boxes/ Columns are more voters, and knew the level of community participation to come to the polling stations in the Tangerang City election. The analysis that used descriptive analysis. The results of the research showed that the incumbent paslon is quite popular, the majority of respondents are satisfied with the incumbent paslon performance, the majority were not aware of the existence of empty box/column pairs and do not knew the implications if empty boxes /columns are chosen/ won. Recommendations were submitted that the elected regional head would later need to improved his development performance and the need for more socialization related to the single pair pilkada carried out by the KPU and multi-stakeholder collaboration.

Key word: Pilkada, Kotak/ Kolom Kosong, Paslon Tunggal, Kota Tangerang

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat tidak bisa dipisahkan dari upaya bangsa Indonesia meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan daerah menyusul bergulirnya agenda demokratisasi pasca-Orde Baru. Sesuai amanat konstitusi hasil amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat (Syamsuddin Haris. 2017). Lebih lanjut Haris mengatakan, bahwa terdapat sejumlah argumen mengapa pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Selain itu, pemilihan oleh segelintir anggota DPRD pun cenderung oligarkis karena berpotensi sekadar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka. Kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat karena secara langsung rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap terbaik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Ketiga, pilkada langsung bagaimana pun mawadahi proses seleksi kepemimpinan secara *bottom-up*, dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang didrop dari atas atau bersifat *top-down*. Keempat, pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD. Karena diasumsikan relatif bebas dari politik uang, pimpinan daerah produk pilkada langsung diharapkan dapat melembagakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menegakkan pemerintah daerah yang bersih. Kelima, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah, sehingga dapat mendorong stabilisasi politik dan efektifitas pemerintahan lokal.

Kebijakan pemerintah mendorong proses pemilu kepala daerah dilaksanakan secara serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan dalam tiga tahap. *Tahap pertama* diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. *Tahap kedua* dilaksanakan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. *Tahap ketiga* dilaksanakan pada Juni 2018 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model Pilkada serentak pada tahun 2027.

Menurut sumber KPU (2018) Pilkada serentak digelar pada 27 Juni 2018 yang akan diikuti 171 daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 daerah atau sekitar 9% daerah diikuti oleh pasangan oleh pasangan calon (Paslon) tunggal yang tersebar di 10 Provinsi. Artinya, 16 Paslon yang berlaga di 16 daerah tersebut akan melawan kolom kosong di surat suara alias kotak kosong. Isu mahalnya mahar agar dapat diusung oleh partai pendukung menjadi salah satu alasan meningkatnya calon tunggal di Pilkada serentak. Selain itu, kurangnya kader partai yang mumpuni untuk dicalonkan serta masih sulitnya calon dari jalur perseorangan (nonpartai) membuat Pilkada serentak memunculkan calon

tunggal. Meskipun hanya melawan kotak kosong, proses pemilihan Pilkada dengan calon tunggal tetap berlangsung sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (katadata.co.id).

Romli,L. (2018) memberikan pandangan bahwa jika kita melihat regulasi tentang pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak jauh berbeda dengan bukan pasangan calon tunggal (lebih dari satu pasangan calon). Yang membedakan hanya ambang batas kemenangan, yaitu harus lebih dari 50% dari suara sah, sedangkan tentang hal-hal lain, seperti kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, sama seperti pada pasangan calon lebih dari satu pasang. Sementara itu, untuk Kolom Kosong, yang merupakan “kompetitor” dari pasangan calon tunggal tidak diatur atau lebih tepatnya tidak ada regulasi bagaimana “hak dan kewajiban” untuk Kolom Kosong. Lebih lanjut Romli,L. (2018) mengatakan bahwa “ada beberapa faktor terkait dengan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak. *Pertama*, keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu petahana dan partai politik. Petahana berkepentingan untuk menjaga *status quo*, tetap berkuasa, dengan cara menjegal saingan lewat “borong partai”. Sementara itu, partai- partai berkepentingan untuk menang dan atau mendompleng petahana karena memiliki elektabilitas yang tinggi. *Kedua*, partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Alih-alih sebagai bagian dari institusi sosial untuk menyiapkan calon-calon pemimpin, partai terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitnya. Partai politik mestinya malu dengan pilkada yang hanya menampilkan calon tunggal. Tetapi rupanya rasa malu itu dengan mudah bisa disingkirkan, karena ada kepentingan pragmatis tadi. *Ketiga*, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari beratnya persyaratan untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan (independen). Ujung-ujungnya bagi yang ingin maju menjadi calon kepala daerah, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Dengan kata lain, pilkada hanya disediakan bagi mereka yang punya dukungan dana besar”.

Pada kondisi kontestasi Pilkada Di Kota Tangerang, hanya paslon petahana Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Arief Wismansyah dan Sachrudin yang maju di Pilwalkot Tangerang 2018-2023. Setidaknya 12 parpol telah memberikan mendukung pasangan Arief dan Sachrudin. Sepuluh parpol berkoalisi yakni; Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, Gerindra, Hanura dan NasDem, serta partai pendukung lainnya adalah partai baru non parlemen PSI dan Perindo.

Koalisi yang masif dan solid menjadi hal penting untuk pemenangan kontestasi pilkada. Hasil penelitian Makhasin (2016) pada pilkada serentak di Jawa Tengah tahun 2015 menyebutkan bahwa faktor pembentukan koalisi sebagai salah satu aspek penting, faktor lain seperti dukungan pendanaan, strategi kampanye dan pengaruh media juga memainkan peran yang tidak kalah penting bagi

kemenangan pilkada. Baik ideologi maupun pragmatisme memainkan peran yang sama pentingnya sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi.

Pemilu dan pilkada yang demokratis juga sangat ditentukan dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi selain juga kualitas proses penyelenggaraanya, agar diperoleh produk politik yang baik pula. Partisipasi politik merupakan hak bagi warga negara. Surbakti.R. mengatakan bahwa “Keikutsertaan warga negara dalam Pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum”.

Marijan. K. (2016:127) mengatakan bahwa “ikut serta di dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Di sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia, ikut di dalam pemilu merupakan bagian dari apa yang disebut Bruce Ackerman dan James Fishkin (2001:7) sebagai *civil privatism*. Mengikuti pemilu merupakan urusan pribadi, meskipun hal ini menyangkut urusan kenegaraan (publik). Ketika datang ke bilik-bilik suara, pilihan-pilihan yang dibuat juga merupakan bagian dari masalah pribadi. Di dalam Bahasa *fiqh*, datang ke bilik-bilik suara lalu menjadi *'fadlu khifayah'*. Manakala sudah ada yang datang dan melakukan pilihan, bukanlah suatu kewajiban bagi warga negara yang lain. Tetapi di dalam situasi demikian, warga negara bisa seenaknya sendiri (*selfish*), atau bagi yang tidak cukup informasi (*uninformed citizen*), ketika menghadapi hari pemilihan. Mereka bisa datang atau tidak ke bilik-bilik suara, itu bukanlah merupakan masalah. Hanya saja, di dalam konteks demokrasi yang partisipatoris, hal demikian bisa memunculkan masalah. Kecenderungan *'civic privatism'* itu bisa melahirkan sikap apatis yang akhirnya bisa mengarah pada sikap tidak peduli (*ignorance*) terhadap masalah-masalah politik”.

Beberapa catatan penting tentang partisipasi masyarakat pada pilkada, terutama terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi warga datang ke TPS untuk memilih, diungkapkan oleh Silvi Dhesinta, W. (2016). Hasil penelitiannya mengukapan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pada pilkada Kota Belitar tahun 2015. Seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. Selain beberapa daerah belum mengetahui secara benar tata cara pemilihan pada pemilihan referendum, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 juga masih rendah. Karena faktor cuaca yakni pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blitar diguyur hujan, banyak warga yang lebih memilih pergi ke sawah daripada pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktor lain seperti tidak adanya pemilih yang berada di Kabupaten Blitar juga mendukung minimnya tingkat partisipasi masyarakat. Geliat Pilkada serentak juga minim partisipasi dikarenakan beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang tidak cocok dengan hati nuraninya. Beberapa warga merasa bahwa tidak ada kompetisi dalam pilkada. Oleh karenanya, tingkat partisipasi partai politik ataupun calon independen untuk ikut serta dalam proses pilkada juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan memberikan hak pilihnya.

Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang tahun 2018 harus terus didorong agar optimal, terlebih KPU Kota Tangerang telah menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 78% diharapkan bisa tercapai (bantenhits.com, 2018).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; Mengetahui opini publik tentang popularitas Paslon petahana Arief R Wismansyah–Sachrudin, mengetahui opini publik terhadap kinerja Paslon Petahana Arief R Wismansyah–Sachrudin, mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kota Tangerang tentang Kotak/Kolom Kosong pada Pilkada Kota Tangerang, mengetahui opini masyarakat tentang implikasi jika Kotak/Kolom Kosong yang lebih banyak pemilihnya dan, mengetahui tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada Pilkada Kota Tangerang.

METODE

Jenis penelitian berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Siregar, Sofyan (2013) memberikan pengertian penelitian survei merupakan penelitian dengan tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variable-variabel yang diteliti. Sementara Singarimbun.M dan Effendi.S. (2008) menjelaskan ciri khas penelitian survei adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner, dimungkinkan pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. Secara bentuk, penelitian ini menggunakan survei *snapshot*, karena sifatnya mirip dengan memotret kamera. Menurut Ariyanto (2007) survei *snapshot* hanya dirancang untuk memotret pendapat publik, hanya satu kali saja. Seperti halnya dengan jepretan fotografer, peneliti hanya mempunyai satu moment untuk menangkap apa yang dipikirkan oleh masyarakat Kota Tangerang terkait dengan pasangan tunggal dan kotak/kolom kosong. Survey jenis snapshot bisa dipakai untuk mengevaluasi kebijakan publik, tetapi tidak bisa dipakai dalam kasus dimana sentimen publik bisa sangat cepat berubah. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 400 responden, tersebar di wilayah (kecamatan dan kelurahan) Kota Tangerang yang terdiri dari 200 orang (50%) perempuan dan 200 orang (50%) laki-laki. Kriteria responden yang ditetapkan adalah mereka yang telah berusia 18 tahun ke atas atau telah menikah, sehingga responden terpilih adalah mereka yang memiliki hak untuk memilih pada Pilkada Kota Tangerang tanggal 27 Juni tahun 2018. Jenis pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dan *purposive sampling*. Survei dilaksanakan pada bulan April 2018. Pembahasan dan penyajian data dalam bentuk grafik/chart. Adapun rincian menurut tujuan, metode, variabel/komponen, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini secara diuraikan sebagai berikut:

Tujuan	Metode Analisis	Varibel/Komponen	Data/Sumber Data
Mengetahui opini publik tentang pilkada pasangan tunggal di Kota Tangerang	Analisis deskriptif	a. Identitas responden (umur, gender, dan tingkat pendidikan) b. Opini tentang populeritas pasangan Arief – Sachrudin sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.	• Data primer • Hasil data kuesioner

- c. Opini tentang kinerja kepemimpinan pasangan Arief – Sachrudin selama periode 2013 – 2018
- d. Opini tentang adanya “kotak/Kolom Kosong” yang akan menjadi alternatif pilihan pada Pilkada Kota Tangerang 2018
- e. Opini tentang Implikasi jika Kotak/Kolom Kosong yang lebih banyak dipilih oleh pemilih di Kota Tangerang?
- f. Respon keinginan masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih/mencoblos saat Pilkada yang akan dilaksanakan Pada Tanggal 27 Juni 2018

Sumber: Hasil olah tahun 2018

Metode Analisis deskriptif

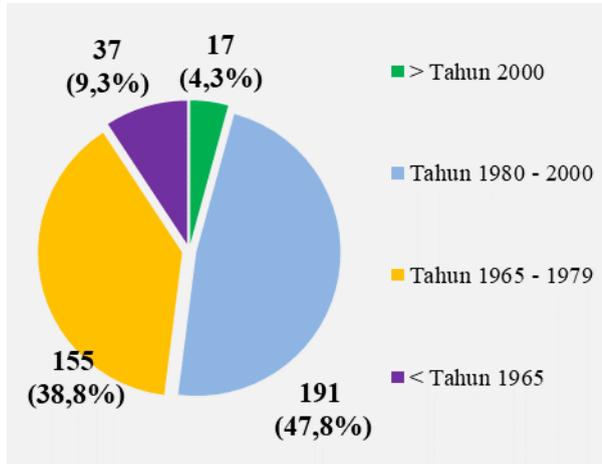
Pada penelitian survei, terdapat tiga jenis analisis data yang dapat digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis korelasional, dan analisis ketepatan estimasi sampel dengan polulasinya. Analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran data yang meliputi tabulasi, peringkasan dan penyajian dalam bentuk grafis dan gambar serta menghitung ukuran-ukuran deskripsinya. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, menganalisis, mensintesis dan menjabarkan fenomena-fenomena yang diperoleh dari hasil analisis lainnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih objektif terhadap keadaan yang sebenarnya. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi eksisting terkait dengan opini masyarakat tentang Pilkada Kota Tangerang tahun 2018, dimana hanya ada satu Paslon yakni Arief –Sachrudin (*petahana*) “melawan” kolom/ kotak kosong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari jenjang umur, dikelompokkan menjadi 4 kelompok umur berdasarkan tahun kelahiran; 1) kelahiran > tahun 2000 sebanyak 17 orang (4,3%) 2) kelahiran pada kisaran tahun 1980 – 2000 sebanyak 191 orang (47,8) 3) kelahiran pada kisaran tahun 1965 – 1979 sebanyak 155 orang (38,8%), dan 4) kelahiran < tahun 1965 sebanyak 37 orang (9,3%). Berdasarkan data ini, jumlah responden paling banyak pada kelahiran kisaran tahun 1980-2000 atau yang biasa disebut generasi milenial. Secara ringkas dapat dilihat pada gambar 1.

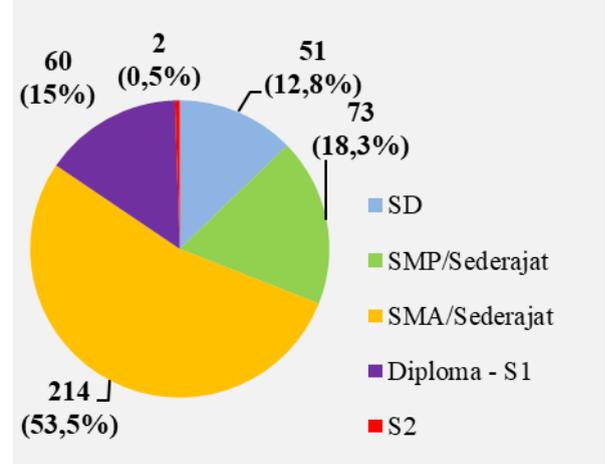
Terkait dengan pendidikan responden, dikelompokkan menurut jenjang pendidikan menjadi 5 kelompok jenjang pendidikan berdasarkan pendidikan akhir responden; 1) jenjang pendidikan SD sebanyak 51 orang (12,8%) 2) jenjang pendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 73 orang (18,3) 3) jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 214 orang (53,5%), dan 4) jenjang pendidikan Diploma-S1 sebanyak 60 orang (15%) dan 5) jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (0,5%). Berdasarkan data ini, jumlah responden paling banyak menurut jenjang pendidikan adalah lulusan SMA/ sedejat. Secara ringkas dapat dilihat pada chart 2.

Chart 1 : Umur Responden



Sumber: Data diolah, 2018

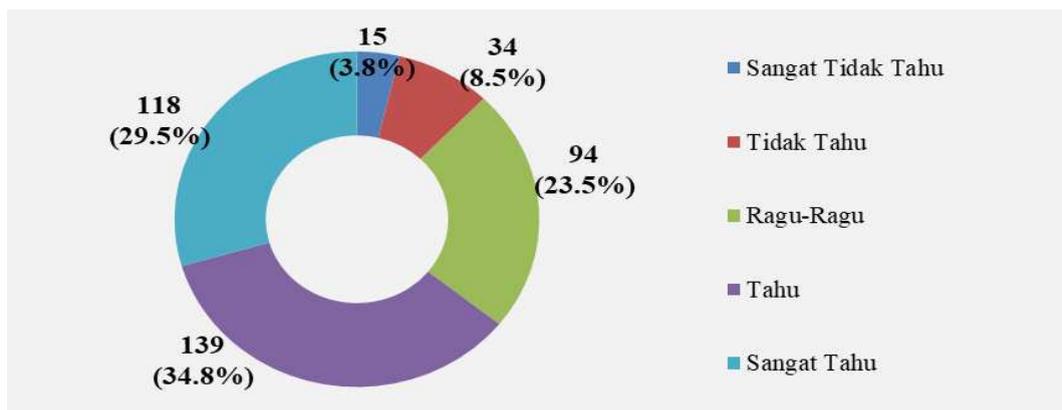
Chart 2: Pendidikan Responden



Sumber: Data diolah, 2018

Ketika ditanyakan pendapat responden tentang populeritas Paslon Arief R Wisnansyah–Sachrudin, 118 (29,5%) responden menjawab Sangat Tahu, 139 (34,8%) responden menjawab Tahu. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Tahu ada 15 (3,8%) orang, dan 34 (8,5%) responden menyatakan Tidak Tahu. Sementara ada 94 orang (23,5%) yang menyatakan Ragu-ragu. Secara ringkas dapat dilihat pada chart 3.

Chart 3: Populeritas Paslon Arief – Sachrudin (Petahana)



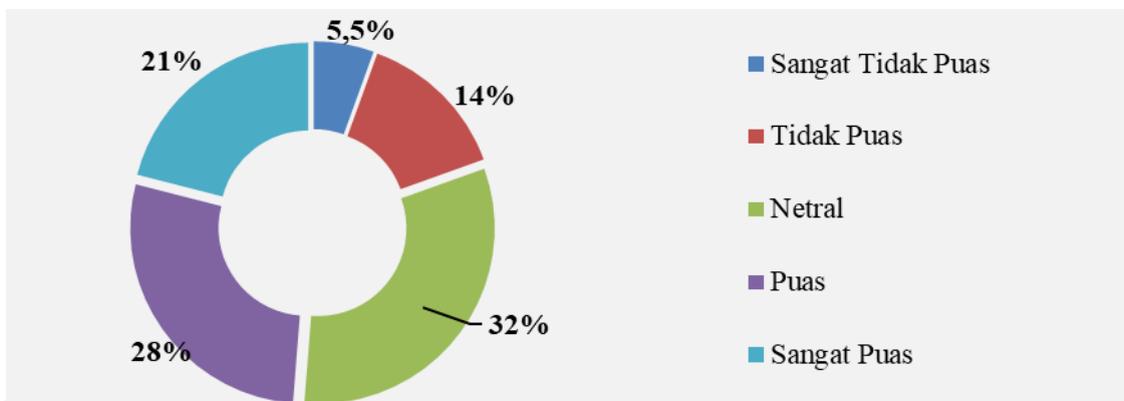
Sumber: Data diolah, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa eksistensi paslon Arief-sachrudin sangat populer, hal ini tidak lepas dari hampir selama kurun waktu 5 tahun sebelumnya pasangan ini senantiasa melakukan giat turun ke masyarakat, juga promosi melalui berbagai macam media (spanduk, baligho, dan medsos) selain juga sosialisasi program kegiatan gencar dilakukan. Hal demikian dari hasil *indepth interview* terungkap, sehingga banyak masyarakat mengetahui eksistensi keberadaan pasangan ini. Popularitas juga

diperoleh dari banyaknya kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Tangerang yang melibatkan masyarakat, seperti kegiatan festival-festival dan gencarnya dibangun beberapa fasilitas publik seperti taman-taman kota sebagai tempat alternatif bagi warga Kota Tangerang dalam berekreasi.

Ketika ditanyakan pendapat responden tentang kinerja Paslon Arief R Wismasnyah – Sachrudin pada periode sebelumnya, ada 84 (21%) responden menjawab Sangat Puas, 111 (28%) responden menjawab Puas. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Puas ada 22 (5,5%) orang, dan ada 56 (14%) responden menyatakan Tidak Puas. Sementara ada 127 orang (32%) yang menyatakan Netral/ Biasa saja. Secara ringkas dapat dilihat pada chart 4.

Chart 4: Kinerja Paslon Arief – Sachrudin (Petahana)



Sumber: Data diolah, 2018.

Alasan responden menyatakan “Puas” terhadap kinerja Paslon petahana karena dianggap petahana telah melakukan berbagai macam pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kota Tangerang, diuraikan sebagai berikut:

Aspek	Contoh Pembangunan
Infrastruktur	Program Bedah rumah, jalan sudah bagus, penerangan jalan, pembangunan tanggul, perbaikan saluran drainase, dan pembangunan berbagai macam fasilitas umum, seperti taman-taman, dll.
Pelayanan Publik	Sekolah dan kesehatan gratis, Pelayanan cepat, menggunakan teknologi sehingga lebih efektif, pelayanan lebih mudah
Ekonomi/Kesejahteraan	Telah membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya UMKM, ekonomi bertumbuh, penyelenggaraan berbagai macam festival-festival di masyarakat.
Sosial Lingkungan	Memberikan bantuan sosial, adanya program PHBS di wilayah Tangerang bersih, gerakan penghijauan, taman kota yang indah, kampung bekelir, banyak spot hiburan/wisata warga, nyaman, tertib dan tenteram
Personalitas/Gaya Kepemimpinan	Sering datang ke kampung, ramah, dekat dengan masyarakat, baik, dan gerakan subuh berjamaah

Sumber: Data diolah, 2018

Alasan responden menyatakan “Tidak Puas” terhadap kinerja pembangunan Paslon Petahana diuraikan sebagai berikut:

Aspek	Contoh Pembangunan
-------	--------------------

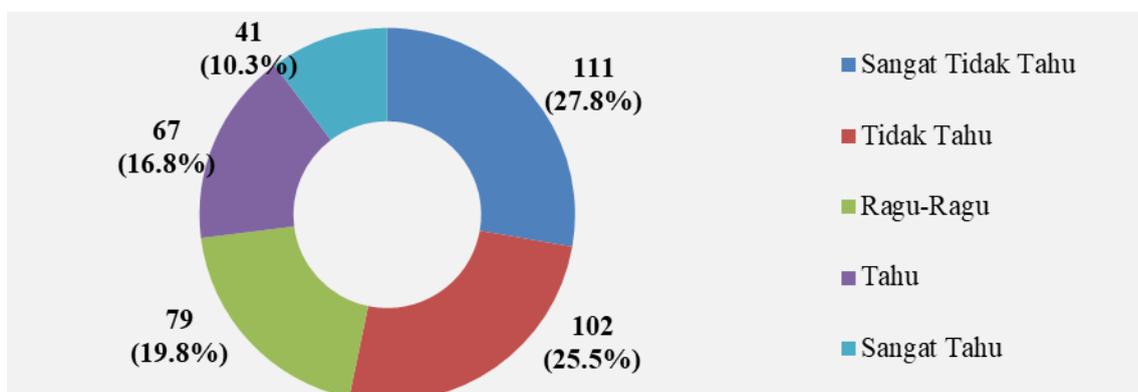
Infrastruktur	Masih banyak jalanan yang hancur belum tertangani, Pembangunan hanya dipusatkan di pusat saja seperti taman, belum merata di setiap kecamatan.
Pelayanan Publik	Masih adanya urusan-urusan yang dipersulit dalam mengurus identitas, regulasi rumit (membuat perijinan sulit), dan mengapa sekolah di SMA berbayar?
Ekonomi/Kesejahteraan	Ekonomi masih rendah contoh UMKM tidak merata, masih banyak pedagang yang sering diusir, tidak ada lahan untuk pedagang kaki lima, dan masih kurangnya lapangan pekerjaan
Lingkungan	Masih banyak sampah dan limbah yang belum diperhatikan
Personalitas/Gaya Kepemimpinan	Belum sepenuhnya janji dan kinerja dilaksanakan, Bagus kerjanya tetapi masih kurang turun ke bawah (ke wilayah), biasa saja tidak ada efek besar yang dirasakan, masih ada kesan pencitraan dan belum ada terobosan kebijakan yang baru.
Olah Raga	Kondisi persepakbolaan vakum

Sumber: Data diolah, 2018

Kinerja Paslon Arief-Sachrudin juga dinilai oleh masyarakat saat beberapa program pembangunan mampu menjawab beberapa permasalahan perkotaan di Kota Tangerang, beberapa program yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung diantaranya adalah Program Kampung Tematik (walaupun eksistensinya ada yang terkesan kurang optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya). Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni dan Penyelenggaraan berbagai macam Festival yang secara kualitas mengalami peningkatan dari sisi penyelenggaraannya juga mampu memberikan apresiasi kinerja yang baik terhadap paslon arief-sachrudin. Walaupun dari sisi pelaksanaan program masih ada yang harus ditingkatkan, terutama dalam penuntasan program bedah rumah, yang jangan terkesan asal bangun tanpa memperhatikan keserasian bangunan.

Ketika ditanyakan tentang pengetahuan responden tentang Kotak/Kolom Kosong pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 yang menjadi “lawan” dari Paslon Arief R Wismansyah– Sachrudin, 41 (10,3%) responden menjawab Sangat Tahu, 67 (16,8%) responden menjawab Tahu. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Tahu lebih banyak yakni ada 111 (27,8%) responden, dan 102 (25,5%) responden menyatakan Tidak Tahu. Sementara ada 79 (19,8%) responden yang menyatakan Nertral/Ragu-ragu. Secara ringkas dapat dilihat pada chart 5.

Chart 5: Pengetahuan tentang Kotak/ Kolom Kosong

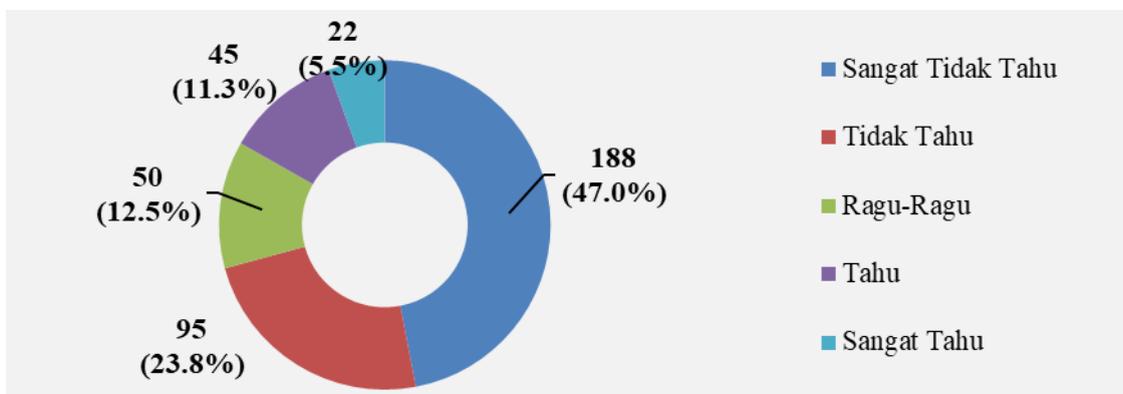


Sumber: Data diolah, 2018.

Masyarakat banyak menyatakan bahwa dirinya mengetahui akan adanya kolom kosong atau kotak kosong yang menjadi “lawannya” petahana (Arief-sachrudin), hal ini tidak lain juga adalah karena sosialisasi atas eksistensi kotak kosong senantiasa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, sebagai satu-satunya provider penyelenggaraan pemilu daerah ini. KPU wajib memberikan hak politik juga kepada Kolom/kotak kosong untuk menjadi kontestasi dalam Pilkada Kota Tangerang. Hasil indept interview masyarakat mengetahui melalui beberapa media (TV, Medsos, Spanduk, Baligho, dan pamflet-pamflet) bahkan ada yang mengetahuinya dari diskusi-diskusi di warung-warung kopi atau obrolan santai di beberapa tempat tongkrongan anak-anak muda (café, dll). Sisi lain ini menunjukkan hal positif bagi pemahaman masyarakat umum akan perkembangan demokrasi, walaupun sebagian juga mencibir terhadap fungsi dan peran partai politik yang dinilai tidak mampu menghasilkan kader-kader politiknya dengan baik.

Ketika ditanyakan pengetahuan responden tentang implikasi jika Kotak/ Kolom Kosong yang yang lebih banyak pemilihnya pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018, 22 orang (5,5%) responden menjawab Sangat Tahu, 45 (11,3%) responden menjawab Tahu. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Tahu lebih banyak yakni ada 188 (47%) responden, dan 95 (23,8%) responden menyatakan Tidak Tahu. Sementara ada 50 (12,5%) responden yang menyatakan Nertral/ Ragu-ragu. Secara ringkas dapat dilihat pada chart 6.

Chart 6: Pengetahuan tentang Implikasi Jika Kotak/ Kolom Kosong yang Banyak Memilih



Sumber: Data diolah, 2018

Bagi responden yang menjawab Sangat Tahu dan Tahu, memberikan opini sesuai yang dipahaminya tentang implikasi jika kotak/ kolom kosong yang yang lebih banyak pemilihnya pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018:

Kota Tangerang akan tidak memiliki walikota yang berhak mengambil berbagai keputusan penting walaupun ada pejabat negara yang boleh jadi tidak dikenal masyarakat, pemimpin yang dipilih bukan berdasarkan pilihan masyarakat.

Akan merugikan masyarakat, membuang anggaran dan waktu.

Program pembangunan tidak berjalan dengan baik, karena pemerintahan dipimpin oleh PJS yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Banten.

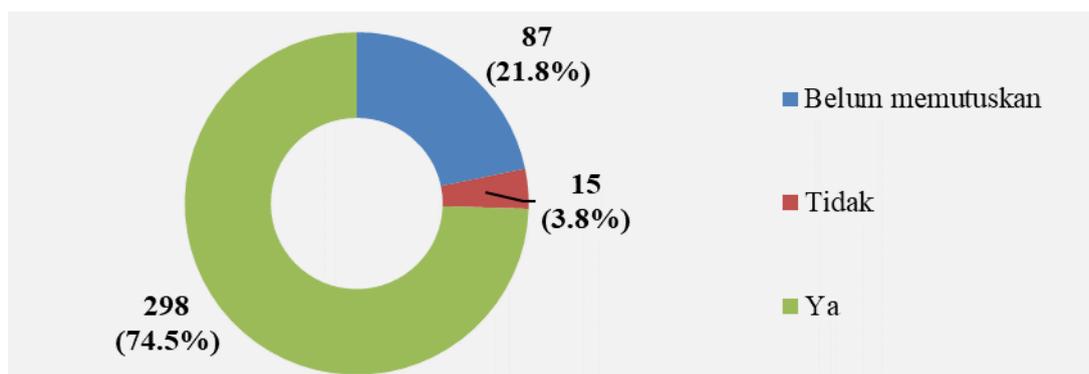
Akan ada pilkada ulang (UU Nomor 10 Tahun 2016), Paslon bisa mencalonkan lagi menjadi kontestan, apabila masa jabatan Paslon habis akan ditugaskan pejabat sementara yang di tunjuk oleh Kemendagri selama 2 tahun sampai ada pilkada lagi.

Anggaran biaya pendidikan tidak bisa dikeluarkan karena PLT tidak mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan anggaran dana tersebut.

Boleh jadi Kota Tangerang butuh pemimpin baru, karena tidak sedikit warga Kota Tangerang yang merasa tidak puas atas kepemimpinan selama ini. Tidak sedikit warga yang apriori terhadap politik Bentuk dari gagalnya kaderisasi parpol, sehingga tidak ada alternatif tokoh Paslon.

Ketika ditanyakan apakah akan berpartisipasi datang ke TPS untuk memilih pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018, secara mayoritas ada 298 (74,5%) responden menjawab Ya akan berpartisipasi datang ke TPS untuk memilih, 15 (3,8%) responden menjawab Tidak Akan Datang ke TPS untuk memilih. Sementara ada 87 (21,8%) responden yang menyatakan Belum Memutuskan. Secara ringkas dapat dilihat pada chart 7.

Chart 7: Berpartisipasi Datang ke TPS Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018



Sumber: Data diolah, 2018.

Antusiasnya masyarakat untuk datang dan memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lepas dari keinginannya untuk berpartisipasi dalam politik pemilihan kepala daerah ini. Selain juga peran KPU yang dengan gencarnya terus melakukan sosialisasi “Ayo Memilih dalam Pilkada 2018.” Masyarakat sudah semakin sadar, bahwa memilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang, menjadi penting bagi keberlangsungan program pembangunan di Kota Tangerang, selain juga ada yang berfikir bahwa ini adalah pembuktian perolehan suara apakah Kotak Kosong memiliki suara yang cukup signifikan melawan paslon petahana Arief-Sachrudin.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1) Poluleritas Paslon Arief R Wismansyah–Sachrudin. Secara mayoritas responden menjawab Paslon Arief R Wismansyah–Sachrudin cukup populer yakni ada 64,3% yang menjawab “sangat tahu dan tahu”, sementara ada 12,3% yang menjawab “sangat tidak tahu dan tidak tahu”, sisanya 23,5% responden menjawab “netral/ragu-ragu”. 2) Kinerja Paslon

Petahana. 48,3% responden menyatakan “Sangat puas dan puas” terhadap kinerja Paslon Arief R Wismansyah – Sachrudin, dan 19,5% responden menyatakan “sangat tidak puas dan tidak puas”, sementara 31,8% menyatakan “Netral/biasa saja”. 3) Pengetahuan tentang Kotak/Kolom Kosong. Mayoritas responden dengan 53,3% menyatakan “sangat tidak tahu dan tidak tahu”, dan ada 17,1% yang menyatakan “sangat tahu dan tahu”, sementara yang menjawab “netral/ragu-ragu” sebanyak 19,8%. 4) Pengetahuan tentang implikasi jika Kotak/Kolom Kosong yang lebih banyak pemilihnya, mayoritas responden dengan 70,8% menyatakan “sangat tidak tahu dan tidak tahu”. Ada 16,8% responden menyatakan “sangat tahu dan tahu”, sementara yang menjawab “netral/ragu-ragu” 12,5%. dan 5) Berpartisipasi datang ke TPS untuk memilih. ada 74,5% menyatakan “ya” akan berpartisipasi datang ke TPS, dan ada 3,8% yang menyatakan “tidak”, sementara yang menjawab “belum memutuskan” 21,8% responden.

Rekomendasi

Bila Paslon petahan Arief R Wismansyah–Sachrudin terpilih kembali pada hasil Pilkada 2018, perlu meningkatkan kinerja pembangunannya yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama terkait dengan; Pembangun infraskturktur jalan, pemerataan pembangunan ke wilayah agar tidak terpusat di kota. Pada bidang pelayanan publik perlu meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan adminstrasi publik, dan pendidikan SMA agar tidak berbayar. Pada bidang ekonomi, perlu pemerataan dukungan kepada UMKM, tersedianya kecukupan lokasi bagi pedagang PKL, dan perluasan lapangan pekerjaan. Pada bidang lingkungan, pengelolaan sampah perlu ditingkatkan, agar sampah tidak menumpuk terutama sampah dan limbah yang ada di pusat-pusat ekonomi, diwilayah kelurahan dan lingkungan warga. Perlu ada terobosan dalam pembangunan, meningkatkan intensitas pertemuan dengan warga dan memajukan persepakholaan di Kota Tangerang. 2) Perlu dilakukan sosialisasi dan pemasangan alat peraga sosialisasi oleh KPU selaku penyelenggara Pilkada Kota Tangerang 2018 ke wilayah-wilayah secara merata dan masif, terkait dengan Paslon yang mengikuti pilkada agar warga lebih mengetahui Paslon tunggal dan Kotak/ Kolom Kosong. 3) Perlu adanya sosialisasi dari multipihak terkait dengan keberadaan kotak/kolom kosong sebagai alternatif pilihan politik agar masyarakat lebih memahami keberadaan kotak/kolom kosong pada pilkada Kota Tangerang 2018 serta implikasinya. 4) KPU Kota Tangerang perlu meningkatkan upayanya melaksanakan sosialisasi tentang Pilkada Kota Tangerang tahun 2018, misalnya berkolaborasi dengan seluruh elemen kelembagaan yang ada di masyarakat selain melakukan kegiatan (*event*) sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, agar tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir ke TPS pada Pilkada Kota Tangerang tanggal 27 Juni 2018 menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. 2017. *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. (cetakan pertama). LKIS. Jakarta

- Haris, Samsuddin. 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. (editor). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.
- Makhasin, Lutfi (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gaja Mada. 19 (3): 248-249
- Marijan, Kacung. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde baru*. (edisi pertama, cetakan ke 5). Kencana.Jakarta.
- Romli, Lili. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, LIPI Jakarta 15(2): 151.
- Silvi Dhesinta, W. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi: Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015. *Jurnal Cita hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* 4(1): 99.
- Singarimbun, Masri dan Effendi,Sofian. (2008). *Metode Penelitian Survei*. (cetakan ke 19). LP3ES.Jakarta.
- Siregar, Sofyan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Prenada Media Group. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.Jakarta.
- <https://bantenhits.com/2018/04/09/fun-bike-cara-kpu-kota-tangerang-ajak-warga-gunakan-hak-pilih-pilkada-2018/>. Diakses 9/12/2019.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/26/berapa-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2018>. Diakses 9/12/2019.